



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pasal 126 s.d 129, yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Awal Renja Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti peraturan tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun harus menyusun rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program ,kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Awal ini menyajikan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya (2023) yang berintikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta Rencana Kerja serta pendanaan Perangkat daerah pada tahun 2025 yang akan datang.



Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rencana Kerja ini Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi-Nya, aamiin.

Tg. Balai Karimun, 7 Oktober 2024

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App, Sc

Pembina Utama Muda

NIP.196710031992031010



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	23
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3 Program dan Kegiatan Prioritas	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	56

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun 2023	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	18
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022 – 2023	22
Tabel 2.4.	Permasalahan	23
Tabel 2.5	Isu Strategis.....	23
Tabel 2.6	Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025	25
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan	41
Tabel 4.1	Rencana Progam dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	44



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang sekaligus merupakan acuan bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun dan menata perencanaan pembangunan yang disusun, baik pembangunan jangka menengah yang kemudian dituangkan dalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun pembangunan jangka pendek.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian di rinci atau di *breakdown* ke dalam Pembangunan Jangka Pendek atau Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mencapai Visi dan Misi pemerintah daerah kemudian juga menyusun rencana kerja tahunan (Renja) dengan mempedomani program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam Renstra masing-masing OPD. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang bertugas menjaga kestabilan dan Keharmonisan kehidupan ketenagakerjaan dan perindustrian di Kabupaten Karimun yang pada tahun 2024 ini telah melaksanakan serangkaian proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja pembangunan untuk tahun 2025 dengan membaurkan proses *Top Down Planning* dengan *Buttom Up Planning* yang diselenggarakan pada awal tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
 21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 10);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

Agar pelaksanaan pembangunan urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

1. Menentukan prioritas pembangunan jangka menengah tahap awal (Renstra 2021-2026).
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan ketenagakerjaan dan perindustrian antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun s/d tahun 2023 sebagai berikut :

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun untuk tahun anggaran 2023 telah mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Karimun sebesar Rp. 8,224,108,898,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,876,154,931,- atau sebesar 83,61 Persen.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan di atas dapat dilihat dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Tabel. 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Karimun
Periode Pelaksanaan Tahun Anggaran 2023
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Sasaran	Kode					Urusan / Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Ouput) (Renstra 2022-2026)	Satua n	Target Renstra Perangkat daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggun g Jawab
										7		8		9		10		11		12		
1	2	3					4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
		2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	21,608,220,000	-	2,787,644,947	89.92	4,521,294,175	89.92	91.85	89.92	7,308,939,122	112.40	33.82	Disnakerin
		2	7	1	2 , 0 1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Doku men	37	624,500,000	6	48,927,252	6	82,982,283	75.88	75.88	6	131,909,535	16.22	21.12	Disnakerin
		2	7	1	2, 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Doku men	11	249,000,000	2	40,079,252	2	35,559,457	100.00	63.88	4	75,638,709	36.36	30.38	Disnakerin
		2	7	1	2, 0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an	3	237,500,000	1	8,848,000	3	40,722,826	100.00	92.23	3	49,570,826	100.00	20.87	Disnakerin



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		2	7	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	138,000,000	0	-	2	6,700,000	100.00	70.16	2	6,700,000	1.00	4.86	Disnakerin
		2	7	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen	14	17,425,000,000	5	2,738,717,695	2	3,680,620,829	50.00	94.74	7	6,419,338,524	50.00	36.84	Disnakerin
		2	7	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1608	17,285,000,000	364	2,656,025,695	364	3,614,632,829	100.00	95.26	364	6,270,658,524	22.64	36.28	Disnakerin
		2	7	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Dokumen	1	140,000,000	1	82,692,000	1	65,988,000	100.00	72.91	1	148,680,000	100.00	106.20	Disnakerin
		2	7	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	8	450,000,000	3	218,202,829	5	226,866,663	83.33	65.39	8	218,202,894	100.00	48.49	Disnakerin
		2	7	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12,600,000	1	1,998,000	1	1,983,900	100.00	99.89	2	3,981,900	200.00	31.60	Disnakerin
		2	7	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	69,000,000	1	25,262,000	1	71,777,000	100.00	59.49	2	97,039,000	200.00	140.64	Disnakerin
		2	7	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	34,000,000	1	5,705,000	1	7,226,000	100.00	99.40	2	12,931,000	200.00	38.03	Disnakerin
		2	7	1	2,06	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	38,800,000	1	5,090,000	1	5,137,000	100.00	100.00	2	10,227,000	200.00	26.36	Disnakerin
		2	7	1	2,06	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	77,100,000	1	13,960,000	1	9,835,000	100.00	98.35	2	23,795,000	200.00	30.86	Disnakerin
		2	7	1	2,06	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	218,500,000	1	166,187,829	1	130,907,763	100.00	64.84	2	297,095,592	200.00	135.97	Disnakerin
		2	7	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	26	2,721,450,000	2	473,429,667	0	472,427,500	0.00	95.11	1	945,857,167	3.85	34.76	Disnakerin



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		2	7	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	92,000,000	1	77,834,667	1	23,577,500	100.00	87.91	2	101,412,167	13.33	110.23	Disnakerin
		2	7	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	2,629,450,000	1	395,595,000	1	448,850,000	100.00	95.52	2	844,445,000	0.13	32.11	Disnakerin
		2	7	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	35	387,270,000	3	152,990,800	3	58,396,900	100.00	68.99	6	211,387,700.00	17.14	54.58	Disnakerin
		2	7	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	140,660,000	1	36,375,000	1	40,575,900	100.00	74.91	2	76,950,900.00	100.00	54.71	Disnakerin
		2	7	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	63,610,000	1	105,765,800	1	5,901,000	100.00	31.89	2	111,666,800.00	100.00	175.55	Disnakerin
		2	7	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	42,000,000	4	10,850,000	4	11,920,000	100.00	99.58	4	22,770,000.00	80.00	54.21	Disnakerin
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																89.92	91.85			112.40	33.82	
Predikat Kinerja																T	ST			ST	SR	
2	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal yang kompetitif	2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Person	58.00	24,610,087,000	23.87	4,370,290,516	53.57	1,308,552,032	94.90	79.70	53.57	5,678,842,548	92.36	23.08	Disnakerin
		2	7	3	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Person	30	24,250,087,000	30	4,370,290,516	30	1,267,690,409	100.00	79.58	30	5,637,980,925	100.00	23.25	Disnakerin
		2	7	3	2,01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	2810	23,730,087,000	480	4,370,290,516	100	1,267,690,409	94.34	87.72	580	5,637,980,925	20.64	23.76	Disnakerin



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	5	520,000,000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Disnakerin	
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Doku men	5	360,000,000	1	40,461,700	1	40,861,623	100.00	83.39	2	81,323,323	40.00	22.59	Disnakerin
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Doku men	5	360,000,000	1	40,461,700	1	40,861,623	100.00	83.39	2	81,323,323	40.00	22.59	Disnakerin
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													94.90	79.70			92.36	23.08		
Predikat Kinerja													ST	T			ST	SR		
2	07	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Perse n	47.25	2,550,000,000	91,22	85,360,500	52.96	323,244,412	113.89	94.02	52.96	408,604,912	112.08	16.02	Disnakerin
					Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	Rupia h (Mily ar)	10,600,000,000			815,000,000		1,176,725,000		58.84		1,991,725,000		18.79		
2	07	4	2.01	1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja	Doku men	5	1,420,000,000	0	0	2	241,267,090	100.00	99.95	2	241,267,090	30.00	19.08	Disnakerin
2	07	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	500,000,000	0	0	30	95,414,690	100.00	100.00	30	95,414,690	30.00	19.08	Disnakerin
2	07	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	100	920,000,000	0	0	30	145,852,400	100.00	99.63	30	145,852,400	30.00	15.85	Disnakerin
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja	Perus ahaan	35	590,000,000	30	35,776,500	5	40,260,139	100.00	78.63	35	76,036,639	100.00	12.89	Disnakerin
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Doku men	5	590,000,000	1	35,776,500	1	40,260,139	100.00	78.63	2	76,036,639	40.00	12.89	Disnakerin
2	7	4	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA	Orang	555	540,000,000	0	49,584,000	102	41,717,183	91.89	81.50	102	91,301,183	18.38	16.91	Disnakerin



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2	7	4	2. 0 5	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	5	540,000,000	1	49,584,000	1	41,717,183	100.00	81.50	2	91,301,183	40.00	16.91	Disnakerin
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														86.36	99.95			65.44	16.02	
Predikat Kinerja														T	ST			R	SR	
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian kasus yang difasilitasi	Kasus	28	1,365,000,000	5	414,163,564	3	286,304,363	60.00	61.94	8	700,467,927	28.57	51.32	Disnakerin
2	7	5	2. 0 1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP	Perusahaan	30	705,000,000	31	264,923,564	22	185,157,513	100.00	57.64	22	450,081,077	73.33	63.84	Disnakerin
						Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB	Perusahaan	4		4		4		100.00		4		100.00		Disnakerin
2	7	5	2. 0 1	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	5	705,000,000	1	264,923,564	1	185,157,513	100.00	57.64	2	450,081,077	40.00	63.84	Disnakerin
2	7	5	2. 0 2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	660,000,000	1	149,240,000	1	101,146,850	100.00	71.74	2	250,386,850	40.00	37.94	Disnakerin
2	7	5	2. 0 2	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	660,000,000	1	149,240,000	1	101,146,850	100.00	71.74	1	250,386,850	100.00	37.94	Disnakerin
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														60.00	61.94			28.57	51.32	
Predikat Kinerja														R	R			SR	R	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
		3	3 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
3	Meningkatnya Kewirausahaa n Masyarakat	3	3 1	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Perse n	88.90	5,315,000,000		669,922,635	21.54	201,657,850	30.93	25.10	34.79	871,580,485	39.13	16.40	Disnakerin	
		3	3 1	2	2 0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Doku men	30	5,315,000,000	2	669,922,635	2	201,657,850	100.00	25.10	4	871,580,485	13.33	16.40	Disnakerin	
		3	3 1	2	2 0 1	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Doku men	5	270,000,000	1	54,000,000	1	84,271,200	100.00	60.19	2	138,271,200	40.00	51.21	Disnakerin
		3	3 1	2	2 0 1	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Doku men	5	5,045,000,000	1	669,922,635	1	117,386,650	100.00	17.69	2	787,309,285	40.00	15.61	Disnakerin
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)													30.93	25.10			39.13	16.40		
		Predikat Kinerja													SR	SR			SR	SR		
		3	3 1	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini	Doku men	5	300,000,000	0	-	1	49,944,586	100.00	99.89	1	49,944,586	20	16.65	Disnakerin	
		3	3 1	4	2 0 1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Doku men	5	300,000,000	0	-	1	49,944,586	100.00	99.89	1	49,944,586	20	16.65	Disnakerin	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		3	3 1	4	2, 0 1	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Doku men	5	300,000,000	0	-	1	49,944,586	100.00	99.89	1	49,944,586	20	16.65	Disnakerin
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100.00	99.89			20.00	16.65	
Predikat Kinerja																ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															6,876,154,931							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																77.02	76.40					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																T	T					



Tabel. 2.2
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Ouput) (Renstra 2022-2026)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	-	75	89.92	112.40	80	80	100%
2	7	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	37	6	6	6	16.22	4	4	100%
2	7	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	11	2	2	4	36.36	2	2	100%
2	7	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	1	3	3	100.00	1	1	100%
2	7	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	0	2	2	1.00	1	1	100%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2	7	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen	14	5	2	7	50.00	2	2	100%
2	7	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1608	364	364	364	22.64	432	432	100%
2	7	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Dokumen	1	1	1	1	100.00	1	1	100%
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1	1	100%
2	7	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket						1	1	100%
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	8	3	6	8	100.00	6	6	100%
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	2	200.00	1	1	100%
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	2	200.00	1	1	100%
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	2	200.00	1	1	100%
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	2	200.00	1	1	100%
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	2	200.00	1	1	100%
2	7	1	2.06	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	2	200.00	1	1	100%
2	7	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	26	2	2	1	3.85	2	2	100%
2	7	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	1	1	2	13.33	1	1	100%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2	7	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	1	1	2	0.13	1	1	100%
2	7	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	35	3	3	6	17.14	3	3	100%
2	7	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	1	1	2	100.00	1	1	100%
2	7	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	1	1	2	100.00	1	1	100%
2	7	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	4	4	4	80.00	1	1	100%
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	58.00	23.87	56.45	53.57	92.36	53,57	53,57	100%
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	30	30	30	30	100.00	30	30	100%
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	2810	480	106	580	20.64	109	109	100%
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	5	0	7	0	0.00	5	5	100%
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	5	1	1	2	40.00	1	1	100%
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	5	1	1	2	40.00	1	1	100%



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2	07	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	47.25	91,22	46.5	52.96	112.08	46,75	46,75	100%
						Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	Rupiah (Milyar)	10,600,000,000	815,000,000	2,000,000,000	1,991,725,000	18.79	1,300,000,000	1,300,000,000	100%
2	07	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja	Dokumen	5	0	2	2	30.00	1	1	100%
2	07	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	0	30	30	30.00	30	30	100%
2	07	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	100	0	30	30	30.00	30	30	100%
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja	Perusahaan	35	30	5	35	100.00	30	30	100%
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	5	1	1	2	40.00			
2	7	4	2.04		Pelindungan PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	Orang	90	0	0	0	0.00	30	30	100%
2	7	4	2.04	1	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	90	0	0	0	0.00	30	30	100%
2	7	4	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA	Orang	555	0	111	102	18.38			
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	5	1	1	2	40.00			



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian kasus yang difasilitasi	Kasus	28	5	5	8	28.57	3	3	100%
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP	Perusahan	30	31	22	22	73.33	25	25	100%
						Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB	Perusahaan	4	4	4	4	100.00	4	4	100%
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	5	1	1	2	40.00	1	1	100%
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	1	1	2	40.00	1	1	100%
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1	1	1	100.00	1	1	100%
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	88.90		69.65	34.79	39.13	100	100	100%
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	30	2	2	4	13.33	2	2	100%
3	31	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	5	1	1	2	40.00			



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3	31	2	2,01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	5	1	1	2	40.00	1	1	100%
3	31	2	2,01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	5	0	0	0	0.00	1	1	100%
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	5	0	1	1	20			
3	31	4	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	1	1	20			
3	31	4	2,01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	5	0	1	1	20			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 telah dapat terlaksana dengan baik dengan tingkat capaian dan berhasil hal ini ditandai dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu dengan capaian baik sementara itu dari 1 (satu) sasaran strategis dengan indikator 'Nilai Akip" untuk tahun 2023 belum diterbitkan inspektorat, selanjutnya untuk indikator "Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin" baru akan dilaksanakan tahun 2024 dengan target "level 3".

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022 – 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU / Indikator Kinerja Program)	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi		Capaian		Target	Proyeksi Target
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen			61,21	61,50	60,46	64,79	98,77	105,35	62	62
2	Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Persen			91,45	97,75	99,60	95,79	108,91	97,99	97,75	97,75
3	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	Persen			0,66	0,50	0,61	0,63	92,42	126	0,55	0,55
4	Nilai Akip	Nilai			73	73	50,08	Belum terbit	68,60		73	73
5	Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	Level			-	-	-	-	-	-	Level 3	Level 3
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai			75	80	0	90,06	0	112,58	80	80
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen			53,45	53,45	48,62	53,57	90,96	100,22	53,57	53,57
8	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen			80	53,50	74,43	52,96	93,04	98,99	46,75	46,75
9	Retribusi IMTA	Rupiah (Milyar)			2.000.000.000	1.500.000.000	454470400	1.176.725.500	22,72	78,45	1.500.000.000	1.500.000.000
10	Penyelesaian Kasus yang difasilitasi	Kasus			5	3	2	3	460	200	3	3
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen			-	75	-	72,06	72,06		80	80
11	Pertambahan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persen			3,6	4,5	3,4	4,08	94,44	90,67	4,5	4,5
12	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen			69,65	69,65	9,38	21,54	13,47	30,93	100	100
13	Dokumen Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah selama Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4 Permasalahan

PERMASALAHAN	
Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Perindustrian
1. Masih Relatif Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus pada bidang-bidang usaha. 2. Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah. 3. Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan norma ketenagakerjaan sesuai aturan. 4. Masih rendahnya komitmen perusahaan untuk merekrut dan melindungi para tenaga kerja wanita dan penyandang disabilitas. 5. Masih banyaknya perusahaan yang tidak menginformasikan lowongan pekerjaan. 6. Kurangnya pengetahuan pencaker dalam penggunaan teknologi.	1. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian Keterbatasan sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian terutama terjadi pada IKM sehingga tidak dapat memberikan output yang maksimal. 2. Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan yang tersedia Permasalahan permodalan juga terutama dialami oleh IKM dalam pengembangan usaha, terutama untuk pemenuhan alat produksi. 3. Rendahnya kerjasama (kemitraan) antara pelaku IKM dengan perusahaan- perusahaan berskala besar khususnya BUMN dan swasta nasional lainnya. 4. Ketersediaan daya listrik untuk industri, Jumlah ketersediaan daya listrik untuk kebutuhan industri belum memadai. disebabkan belum adanya penambahan daya PLN yang dikhususkan untuk industri, sedangkan pihak swasta (PT. SOMA) baru akan beroperasi pada tahun 2022 dengan total daya diperkirakan mencapai 100 MW.

Tabel 2.5 Isu Strategis

ISU STRATEGIS	
Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Perindustrian
1. Tenaga Kerja yang belum optimal menjawab kebutuhan pasar. 2. Tingginya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 3. Masih terbatasnya kompetensi calon tenaga kerja dalam menjawab	1. Belum optimalnya perkembangan IKM dan menjadi tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. 2. Masih banyak wirausaha IKM kekurangan modal, keterampilan belum optimal dan pemasaran yang belum maksimal serta belum

kebutuhan pasar kerja, sehingga masih perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 4. Output pendidikan belum sesuai kebutuhan pasar kerja (link and match).	mampu memberikan akses permodalan pada wirasusaha IKM. 3. Masih ada IKM yang tidak aktif dan tidak sehat yang akan menjadi target pembangunan kedepan. 4. Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan sentra industri menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Karimun. 5. Sentra-sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kota sekitar.
--	--

1.4 Riviui Terhadap Rancangan Awal RPKD

Penyusunan Renja Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025 sejalan dengan Rancangan Awal RPKD Kabupaten Karimun Tahun 2025, yang telah dituangkan secara rinci dan jelas dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun. Bilamana dalam proses perkembangannya terjadi perubahan dalam RPKD baik berupa prioritas, isu strategis maupun kemampuan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustriani Tahun 2025 maka RPKD Kabupaten Karimun Tahun 2025 tetap menjadi pedoman utama, seperti dapat dilihat pada table 2.3 di bawah ini :



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Tabel 2.6 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021	Rencana Tahun 2025			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025		
				Target	Rp.	Sumber Dana			Target	Rp.	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik	3,51 Nilai				Indeks Pelayanan Publik	3,51 Nilai		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin		Nilai Akip	73,00 Nilai				Nilai Akip	73,00 Nilai		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	6,129,810,000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	6,129,810,000	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	170,000,000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	170,000,000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	60,000,000	PAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	60,000,000	PAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	60,000,000	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	60,000,000	PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50,000,000	PAD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50,000,000	PAD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3 Dokumen	4,641,310,000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3 Dokumen	4,641,310,000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	4,566,310,000	PAD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	4,566,310,000	PAD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	75,000,000	PAD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	75,000,000	PAD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	120,000,000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	120,000,000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	30,000,000	PAD	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	30,000,000	PAD
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	40,000,000	PAD	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	40,000,000	PAD
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30,000,000	PAD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30,000,000	PAD
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20,000,000	PAD	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20,000,000	PAD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Laporan	209,500,000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Laporan	209,500,000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	PAD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	PAD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34,000,000	PAD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34,000,000	PAD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	PAD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	PAD
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	PAD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	PAD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,500,000	PAD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,500,000	PAD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100,000,000	PAD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100,000,000	PAD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Laporan	247,000,000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Laporan	247,000,000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	100,000,000	PAD	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	100,000,000	PAD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	127,000,000	PAD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	127,000,000	PAD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	PAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	637,000,000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	637,000,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	25,000,000	PAD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	25,000,000	PAD
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	75,000,000	PAD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	75,000,000	PAD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	537,000,000	PAD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	537,000,000	PAD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Laporan	105,000,000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Laporan	105,000,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	60,000,000	PAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	60,000,000	PAD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30,000,000	PAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30,000,000	PAD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15,000,000	PAD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15,000,000	PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,10%				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,10%		
Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal yang kompetitif			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,71%				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,71%		
			Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	91,55				Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	91,55		
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja	96,33%	200,000,000		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja	96,33%	85,000,000	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	-	200,000,000		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	-	85,000,000	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	100,000,000	PAD	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	85,000,000	PAD
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	-	100,000,000	PAD			-		
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	53,57%	4,345,190,000		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	57,23%	4,345,190,000	
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	30 %	4,100,190,000		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	30 %	4,100,190,000	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	570 Orang	4,000,190,000	PAD	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	570 Orang	4,000,190,000	PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	100,000,000	PAD	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	100,000,000	PAD
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi	1 Lembaga	100,000,000		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi	1 Lembaga	100,000,000	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	100,000,000	PAD	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	100,000,000	PAD
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Laporan Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	1 Laporan	80,000,000		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Laporan Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	1 Laporan	80,000,000	
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	80,000,000	PAD	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	80,000,000	PAD
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	65,000,000		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	65,000,000	
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	65,000,000	PAD	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	65,000,000	PAD
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	46,75 Persentase	725,000,000		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	47,25 Persentase	825,000,000	
			Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.500.000.000 Rp				Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.200.000.000 Rp		
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja	1 Dokumen	425,000,000		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja	1 Dokumen	425,000,000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2 Orang	75,000,000	PAD	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2 Orang	75,000,000	PAD
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	250 Orang	75,000,000	PAD	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	250 Orang	75,000,000	PAD
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	125,000,000	PAD	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	125,000,000	PAD
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	150,000,000	PAD	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	150,000,000	PAD
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Perusahaan yang Mempublikasikan Kesempatan Kerja	5 Perusahaan	300,000,000		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Perusahaan yang Mempublikasikan Kesempatan Kerja	5 Perusahaan	320,000,000	
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	100,000,000	PAD	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	120,000,000	PAD
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 Orang	100,000,000	PAD	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 Orang	100,000,000	PAD
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	100,000,000	PAD	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	100,000,000	PAD
							Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	30 Orang	80,000,000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

					-		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	30 Orang	80,000,000	PAD
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi	3 Kasus	685,000,000		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi	6 Kasus	685,000,000	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki PP	28 Perusahaan	265,000,000		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki PP	28 Perusahaan	265,000,000	
			Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB	4 Perusahaan				Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB	4 Perusahaan		
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan	60,000,000	PAD	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan	60,000,000	PAD
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	60,000,000	PAD	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	60,000,000	PAD
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	145,000,000	PAD	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	145,000,000	PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	3 Laporan	420,000,000		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	3 Laporan	420,000,000	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	70,000,000		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	70,000,000	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	7 Perkara	70,000,000		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	7 Perkara	70,000,000	
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	70,000,000		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	70,000,000	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	130,000,000		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	130,000,000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	80,000,000	PAD	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	80,000,000	PAD
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat			PDRB Perkapita	69,32 Juta (Rp)				PDRB Perkapita	69,32 Juta (Rp)		
	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat		Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	0,66%				Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	0,66%		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	100 Persentase	1,045,000,000		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	100 Persentase	1,085,000,000	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	6 Dokumen	1,045,000,000		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	6 Dokumen	1,085,000,000	
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	75,000,000	PAD	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	75,000,000	PAD
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	50,000,000	PAD	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	50,000,000	PAD
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	50,000,000	PAD	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	50,000,000	PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	50,000,000	PAD	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	50,000,000	PAD
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	750,000,000	PAD	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	670,000,000	PAD
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	70,000,000	PAD	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	70,000,000	PAD
					-		Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	30,000,000	PAD
					-		Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat di awasi	1 Dokumen	30,000,000	PAD
								Jumlah Program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat di implementasikan	1 Dokumen		
					-		Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan Informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	30,000,000	PAD
					-		Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	30,000,000	PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri	1 Dokumen	120,000,000		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri	1 Dokumen	120,000,000	
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berkas Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	120,000,000		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berkas Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	120,000,000	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	60,000,000	PAD					



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60,000,000	PAD				
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini	100%	210,000,000		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini	100%	185,000,000
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	210,000,000		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	185,000,000
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	50,000,000	PAD	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	50,000,000 PAD
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	60,000,000	PAD	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	60,000,000 PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	100,000,000	PAD	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	75,000,000	PAD
TOTAL PAGU ANGGARAN					13.460.000.000					13.460.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2025 mengacu pada RPJMN 2025 – 2029 dengan Sasaran Utama Pembangunan :

1. Pendapatan Perkapita Setara dengan Negara maju.
2. Kemiskinan Menurun Ketimpangan Berkurang.
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
5. Intensitas Emisi GRK menurun menuju *Net Zero Emission*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026, maka penyusunan Dokumen Rencana Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran yang termuat di dalam dokumen Renstra dimaksud, sebagaimana dapat dijelaskan dibawah ini :



1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetiti dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia).			
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
A.	Urusan Ketenagakerjaan		
1.	Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja didaerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,32%
B.	Urusan Perindustrian		
2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita	65,94 Juta (Rp)

Misi 5 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Unggul (Bekeadilan Dalam Pelayanan Publik)			
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.50

2. Sasaran Perangkat Daerah

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang diuraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
----	---------	-------------------------------	--------



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

A.	Urusan Ketenagakerjaan		
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65 %
		2) Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	98 %
B.	Urusan Perindustrian		
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	0,66 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	74 Nilai
		Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	Level 3

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2023 yang akan dicapai sesuai dengan target yakni :

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan
Urusan Ketenagakerjaan			
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
	2. Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		3. Program Hubungan Industrial	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 3. Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		4. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Urusan Perindustrian			
Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan ndustri Kabupaten/Kota
		2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	1. Nilai Akip 2. Level Kematangan Manajemen Resiko (MR) Disnakerin	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2025 dan sekaligus merupakan referensi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini berisikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya serta kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun baik sekretariat maupun bidang – bidang, demi mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rancangan Awal Rencana Kerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 tentang Rencana Kerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Karimun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indeks Pelayanan Publik		3,51 Nilai			3,51 Nilai	
		Nilai Akip		73,00 Nilai			73,00 Nilai	
2.7.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		80 Nilai	6,129,810,000		80 Nilai	6,129,810,000
2.7.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		8 Dokumen	170,000,000		8 Dokumen	170,000,000
2.7.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Karimun	3 Dokumen	60,000,000	PAD	3 Dokumen	60,000,000
2.7.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Karimun	3 Laporan	60,000,000	PAD	3 Laporan	60,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2.7.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Karimun	2 Laporan	50,000,000	PAD	2 Laporan	50,000,000
2.7.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		3 Dokumen	4,641,310,000		3 Dokumen	4,641,310,000
2.7.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Karimun	336 Orang/bulan	4,566,310,000	PAD	336 Orang/bulan	4,566,310,000
2.7.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Karimun	1 Dokumen	75,000,000	PAD	1 Dokumen	75,000,000
2.7.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3 Laporan	120,000,000		3 Laporan	120,000,000
2.7.1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab Karimun	2 Unit	30,000,000	PAD	2 Unit	30,000,000
2.7.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Karimun	1 Paket	40,000,000	PAD	1 Paket	40,000,000
2.7.1.2.05.5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Karimun	1 Dokumen	30,000,000	PAD	1 Dokumen	30,000,000
2.7.1.2.05.10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Karimun	1 Dokumen	20,000,000	PAD	1 Dokumen	20,000,000
2.7.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		8 Laporan	209,500,000		8 Laporan	209,500,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2.7.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	1 Paket	20,000,000	PAD	1 Paket	20,000,000
2.7.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	1 Paket	34,000,000	PAD	1 Paket	34,000,000
2.7.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Karimun	1 Paket	20,000,000	PAD	1 Paket	20,000,000
2.7.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Karimun	1 Paket	20,000,000	PAD	1 Paket	20,000,000
2.7.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Karimun	1 Dokumen	15,500,000	PAD	1 Dokumen	15,500,000
2.7.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Karimun	1 Laporan	100,000,000	PAD	1 Laporan	100,000,000
2.7.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5 Laporan	247,000,000		5 Laporan	247,000,000
2.7.1.2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Karimun	2 Unit	100,000,000	PAD	2 Unit	100,000,000
2.7.1.2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Karimun	3 Unit	127,000,000	PAD	3 Unit	127,000,000
2.7.1.2.07 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab Karimun	1 Unit	20,000,000	PAD	1 Unit	20,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2.7.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Laporan	637,000,000		4 Laporan	637,000,000
2.7.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Karimun	3 Laporan	25,000,000	PAD	3 Laporan	25,000,000
2.7.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	2 Laporan	75,000,000	PAD	2 Laporan	75,000,000
2.7.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	3 Laporan	537,000,000	PAD	3 Laporan	537,000,000
2.7.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8 Laporan	105,000,000		8 Laporan	105,000,000
2.7.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Karimun	2 Unit	60,000,000	PAD	2 Unit	60,000,000
2.7.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Karimun	2 Unit	30,000,000	PAD	2 Unit	30,000,000
2.7.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Karimun	5 Unit	15,000,000	PAD	5 Unit	15,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		7,10%			7,10%	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		62%			61%	
		Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja		0,55%			0,55%	
2.7.2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja		96,33%	85,000,000		96,33%	85,000,000
2.7.2.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja		-	85,000,000		-	85,000,000
2.7.2.2.01.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab Karimun	-	85,000,000	PAD	-	85,000,000
2.7.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		57,23%	4,345,190,000		57,23%	4,345,190,000
2.7.3.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		30%	4,100,190,000		30%	4,100,190,000
2.7.3.2.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab Karimun	570 Orang	4,000,190,000	PAD	570 Orang	4,000,190,000
2.7.3.2.01.2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab Karimun	5 Unit	100,000,000	PAD	5 Unit	100,000,000
2.7.3.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi		1 Lembaga	100,000,000		1 Lembaga	100,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2.7.3.2.02.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab Karimun	1 Lembaga	100,000,000	PAD	1 Lembaga	100,000,000
2.7.3.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Laporan Produktivitas Pada Perusahaan Kecil		1 Laporan	80,000,000		1 Laporan	80,000,000
2.7.3.2.04.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kab Karimun	10 Perusahaan	80,000,000	PAD	10 Perusahaan	80,000,000
2.7.3.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		1 Dokumen	65,000,000		1 Dokumen	65,000,000
2.7.3.2.05.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab Karimun	1 Dokumen	65,000,000	PAD	1 Dokumen	65,000,000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		47,25 Persentase	825,000,000		47,25 Persentase	825,000,000
		Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		2.000.000.000 Rp			2.200.000.000 Rp	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja		1 Dokumen	425,000,000		1 Dokumen	425,000,000
2.07.04.2.01.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kab Karimun	2 Orang	75,000,000	PAD	2 Orang	75,000,000
2.07.04.2.01.2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab Karimun	250 Orang	75,000,000	PAD	250 Orang	75,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2.07.04.2.01.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab Karimun	20 Orang	125,000,000	PAD	20 Orang	125,000,000
2.07.04.2.01.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab Karimun	20 Orang	150,000,000	PAD	20 Orang	150,000,000
2.7.4.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Perusahaan yang Mempublikasikan Kesempatan Kerja		5 Perusahaan	320,000,000		5 Perusahaan	320,000,000
2.7.4.2.03.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab Karimun	1 Dokumen	120,000,000	PAD	1 Dokumen	120,000,000
2.7.4.2.03.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab Karimun	250 Orang	100,000,000	PAD	250 Orang	100,000,000
2.7.4.2.03.3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab Karimun	100 Orang	100,000,000	PAD	100 Orang	100,000,000
2.7.4 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia		30 Orang	80,000,000		30 Orang	80,000,000
2.7.4 2.04.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	Kab Karimun	30 Orang	80,000,000	PAD	30 Orang	80,000,000
2.7.5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi		3 Kasus	685,000,000		6 Kasus	685,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2.7.5.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Telah Memiliki PP		28 Perusahaan	265,000,000		28 Perusahaan	265,000,000
		Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB		4 Perusahaan			4 Perusahaan	
2.7.5.2.01.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab Karimun	35 Perusahaan	60,000,000	PAD	35 Perusahaan	60,000,000
2.7.5.2.01.2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab Karimun	4 Perusahaan	60,000,000	PAD	4 Perusahaan	60,000,000
2.7.5.2.01.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab Karimun	1 Laporan	145,000,000	PAD	1 Laporan	145,000,000
2.7.5.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan		3 Laporan	420,000,000		3 Laporan	420,000,000
2.7.5.2.02.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab Karimun	7 Perkara	70,000,000	PAD	7 Perkara	70,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

2.7.5.2.02.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kab Karimun	7 Perkara	70,000,000	PAD	7 Perkara	70,000,000
2.7.5.2.02.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab Karimun	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	70,000,000	PAD	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	70,000,000
2.7.5.2.02.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab Karimun	1 Lembaga	130,000,000	PAD	1 Lembaga	130,000,000
2.7.5.2.02.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab Karimun	50 Orang	80,000,000	PAD	50 Orang	80,000,000
		PDRB Perkapita		69,32 Juta (Rp)			69,32 Juta (Rp)	
		Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk		0,66%			0,66%	
3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin		100 Persentase	1,085,000,000		100 Persentase	1,085,000,000
3.31.2.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri		6 Dokumen	1,085,000,000		6 Dokumen	1,085,000,000
3.31.2.2.01.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kab Karimun	1 Dokumen	75,000,000	PAD	1 Dokumen	75,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.31.2.2.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab Karimun	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	50,000,000
3.31.2.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab Karimun	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	50,000,000
3.31.2.2.01.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab Karimun	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	50,000,000
3.31.2.2.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab Karimun	1 Dokumen	670,000,000	PAD	1 Dokumen	670,000,000
3.31.2.2.01.6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Karimun	1 Dokumen	70,000,000	PAD	1 Dokumen	70,000,000
3.31.2.2.01.7	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Kab Karimun	1 Rekomendasi	30,000,000		1 Rekomendasi	30,000,000
3.31.2.2.01.8	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat di awasi	Kab Karimun	1 Dokumen	30,000,000		1 Dokumen	30,000,000
		Jumlah Program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat di implemantasikan	Kab Karimun	1 Dokumen			1 Dokumen	
3.31.2.2.01.9	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan Informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Kab Karimun	1 Laporan	30,000,000		1 Laporan	30,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.31.2.2.01.10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Kab Karimun	1 Rekomendasi	30,000,000		1 Rekomendasi	30,000,000
3.31.3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri		1 Dokumen	120,000,000		1 Dokumen	120,000,000
3.31.3.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		1 Dokumen	120,000,000		1 Dokumen	120,000,000
3.31.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini		100%	185,000,000		100%	185,000,000
3.31.4.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	185,000,000		1 Dokumen	185,000,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

3.31.4.2.01.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Karimun	1 Dokumen	50,000,000	PAD	1 Dokumen	50,000,000
3.31.4.2.01.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab Karimun	1 Dokumen	60,000,000	PAD	1 Dokumen	60,000,000
3.31.4.2.01.3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Karimun	1 Dokumen	75,000,000	PAD	1 Dokumen	75,000,000
					13,460,000,000			13,460,000,000



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025, telah disusun berdasarkan acuan dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen anggaran yang ada, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini diharapkan penerapan dan pelaksanaa Program serta kegiatan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun betu-betul dapat menjawab tantangan Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang ada di Kabupten Karimun,

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini disusun, dengan harapan semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan pengarah pelaksanaan semua program dan kegiatan di tahun 2025 mendatang, terakhir kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan, untuk diharapkan dari semua unsur yang terlibat (*stakeholders*) dapat memberi masukan demi penyempurnaan dokumen ini, terima kasih.